

**PELAKSANAAN SOSIALISASI KETENTUAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN PRAJURIT TNI AD BATALYON  
INFANTERI LITAS UDARA 501/BAJRA YUDHA**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MAYA PUSPITA MAHARANI**

**NIM. 115010113111007**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**PELAKSANAAN SOSIALISASI KETENTUAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN PRAJURIT TNI AD BATALYON  
INFANTERI LINTAS UDARA 501/BAJRA YUDHA**

**Maya Puspita Maharani, Herman Suryokumoro, S.H.,M.S,**

**Nurdin, S.H.,M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : maya.puspita.maharani@gmail.com

**Abstrak**

Era globalisasi telah membuka peluang luas bagi negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, maupun pertahanan. Disisi lain, perbedaan kepentingan dalam mengadakan hubungan internasional kerap menimbulkan konflik. Konflik bersenjata atau perang menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan konflik ketika jalan damai tidak lagi dapat ditempuh. Dahulu, perang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran, seiring perkembangan zaman pembatasan melalui hukum untuk mengatur perang mulai dibentuk. Humanisasi hukum perang muncul sejak disahkannya Konvensi Jenewa 1949. Konvensi inilah yang melatar belakangi terbentuknya Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pertolongan kepada mereka yang menderita / menjadi korban perang baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil). Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat prinsip pembeda yang membedakan kombatan dan penduduk sipil, objek militer dan objek sipil. Ratifikasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional Pemerintah Republik Indonesia melalui UU Nomor 59 Tahun 1958, sekaligus menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai kombatan dalam sistem pertahanan Negara. Sebagai kombatan perang. Prajurit satuan tempur TNI AD Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Bajra Yudha wajib memahami, berpedoman, serta melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam setiap pertempuran. Oleh karena itu sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI adalah hal yang sangat penting.

**Kata Kunci :** Konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Tentara Nasional Indonesia, Sosialisasi, Yonif Linud 501/Bajra Yudha

## Abstract

The era of globalization has opened up big opportunities for countries to conduct international relations in various fields, such as in the economic, political, social, cultural, legal, and defense. On the other hand, differences in interest between countries in the international relations often trigger a conflict. Armed conflict or war be one option to resolve the conflict when peaceful way can not longer to be reached. In the past, war is a massacre, over the development period, through legal restrictions there is regulatulation on the war which was began to be formed. Humanization of the law of war emerged since the adoption of the Geneva Convention of 1949. This Convention being the background of the formation of International Humanitarian Law that aims to provide protection and assistance to those who suffered / are victims of war whether they are real / actively participate in hostilities (combat), or they which is not participating in the hostilities (civilians). In the International Humanitarian Law are the distinguishing principles which distinguish combatants and civilians, military objects and civilian objects. Ratification of the provisions of International Humanitarian Law Government of the Republic of Indonesia through Law Number 59 of 1958, as well as placing the Infantry Airborne Battalion 501/Bajra Yudha armies as combatants in the defense system of the State. As the war combatants, Indonesian National Armies (TNI) shall understand, guided, and implement the provisions of international humanitarian law in every battle. Therefore the socialization of International Humanitarian Law in the Indonesian National Armies is very important.

**Keywords :** Armed conflict, International Humanitarian Law, Indonesian National Armies, Socialization, Infantry Airborne Battalion 501/Bajra Yudha.

### A. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini telah membuka peluang luas bagi negara-negara untuk melakukan hubungan internasional, mereka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan. Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik kerap muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam, ekonomi, serta masalah agama dan etnis diantara kedua belah Negara dalam berinteraksi antara satu sama lain. Perang atau konflik bersenjata menjadi salah satu pilihan dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak ketika jalan damai tidak lagi dapat menyelesaikan masalah.

Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa.<sup>1</sup> Karena itu sejarah

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-Konvensi Palang Merah th.1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang**, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 9.

perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian dimulailah pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.<sup>2</sup>

Dengan demikian tidaklah benar, anggapan orang bahwa dua pengertian antara *perang* dan *hukum*, merupakan dua pengertian yang tiada sangkut-paut antara satu dengan yang lainnya, atau bahwa dalam perang lenyap segala hukum, seperti yang digambarkan oleh peribahasa Romawi “*inter arma silent leges*”.<sup>3</sup> Rasa perikemanusiaan dalam perang sebenarnya telah dikenal jauh sebelum itu. Di India sejak dahulu telah dikenal peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak berdaya, luka, dan sakit. Buku undang-undang *Manu* memuat ketentuan terperinci mengenai orang-orang yang tidak boleh diserang, barang-barang rampasan perang, dan larangan untuk melakukan kekejaman.<sup>4</sup>

Yunani kuno dan Roma mengenal ketentuan-ketentuan yang melarang pemakaian racun, pembunuhan tawanan perang, dan penyerangan atas tempat-tempat ibadah. Dalam hukum Islam juga mengenal ketentuan-ketentuan hukum perang yang dengan jelas menggambarkan rasa perikemanusiaan, seperti mengatur ketentuan tentang cara mulanya peperangan, larangan untuk menyerang anak-anak, wanita, orang-orang yang sakit dan lanjut umur, pembagian barang rampasan, perlakuan tawanan, cara mengakhiri perang dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perang dituangkan dalam satu kodifikasi hukum yang menjadi sumber hukum ‘tertulis’. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum perang dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya.

Hingga pada tahun 1949, humanisasi hukum yang mengatur tentang perang maupun konflik bersenjata (*armed conflict*) dimulai sejak pembentukan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977. Konvensi Jenewa 1949 menghasilkan 4 (empat) buku yang masing-masing mengatur mengenai perbaikan angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di medan pertempuran darat, perbaikan kondisi angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di medan pertempuran laut, perlakuan terhadap

---

<sup>2</sup> Jean Pictet, *The Geneva Conventions the Law of War*, dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*.

<sup>3</sup> Buku yang ditulis oleh A. Gentilis, *de Jure Belli*, sedangkan Grotius menulis *de Belli ac Pacis*, dalam Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit*

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid* hlm. 10

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit*.

tawanan perang, serta perlindungan warga sipil di masa perang. Sedangkan Protokol Tambahan I dan II mengatur mengenai konflik bersenjata internasional serta konflik bersenjata non-internasional.

Salah satu prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembeda (*distinction principle*). Dalam prinsip pembeda diatur tentang perbedaan antara kombatan dan non-kombatan/ penduduk sipil (*civilians*). Kombatan merupakan pihak yang diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran, sedangkan non-kombatan merupakan pihak yang tidak terlibat dalam suatu pertempuran. Kombatan dapat dijadikan objek serangan, namun non-kombatan harus dilindungi dari setiap serangan. Dalam prinsip pembeda juga diatur mengenai perbedaan objek-objek militer, yang boleh diserang, dengan objek-objek sipil yang tidak boleh diserang. Objek-objek sipil harus dihormati, dalam arti bahwa objek sipil tidak boleh dijarah, diambil alih atau dipergunakan bagi kepentingan militer.

Prinsip pembeda menurut Konvensi den Haag IV 1907 dan menurut Konvensi Jenewa 1949, disamping beberapa syarat sebagai kombatan yakni dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat, serta mengangkat senjata secara terang-terangan, baik dalam Konvensi den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 mensyaratkan bahwa, anggota angkatan bersenjata (*Armies*), korps sukarela (*volunteer corps*) maupun *billigerent* merupakan kombatan yang wajib melakukan operasinya sesuai hukum dan kebiasaan perang.

Ratifikasi Indonesia terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Pada Tanggal 12 Agustus 1949 menunjukkan bahwa Indonesia turut tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Sejak saat itu Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 (selanjutnya disebut UU Pertahanan Negara) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

UU Pertahanan Negara memuat prinsip pembeda (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan serta penduduk sipil (*civilians*) dalam suatu konflik bersenjata, sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil perlu diadakan untuk mengetahui siapa

yang dapat/ boleh dijadikan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga dapat dijadikan sebagai objek kekerasan (dibunuh) dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut dalam permusuhan. Oleh karena itu, adanya prinsip pembeda dalam UU Pertahanan Negara sekaligus menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kombatan dalam sistem pertahanan negara sebagai upaya bela negara.

Sebagai kombatan dalam sistem pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pelaksanaan tugas pokok tersebut salah satunya ialah dengan mengadakan operasi militer untuk perang. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI wajib melaksanakan operasi militer sesuai hukum dan kebiasaan perang.

Setelah 66 tahun sejak dibentuknya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II, kasus-kasus pelanggaran perang hingga saat ini masih saja terjadi. Sebagai kombatan perang atau pihak yang terlibat langsung pada suatu pertempuran, anggota angkatan bersenjata memiliki hak dan kewajiban dalam penerapan serta penegakkan Hukum Humaniter Internasional. Namun tidak jarang, pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata.

Serangan udara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata militer Suriah terhadap kelompok pemberontak dan oposisi pada 22 September 2014 lalu, yang menewaskan 42 warga sipil dimana 6 (enam) diantara korban serangan tersebut adalah anak-anak.<sup>6</sup> Tidak hanya di Suriah, serangan mortir yang ditembakkan oleh tentara Mesir terhadap para pemberontak menewaskan 10 (sepuluh) warga sipil dalam kontak senjata yang terjadi pada 18 November 2014.<sup>7</sup> Kedua kasus tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh angkatan bersenjata militer pemerintah.

---

<sup>6</sup> Ahmad Ridwan, **Serangan Udara Militer Suriah Tewaskan 42 Warga Sipil** (online), <http://www.news.okezone.com> (9 Februari 2015).

<sup>7</sup> Rita Uli Hutapea, **10 Warga Sipil Tewas dalam Pertempuran Tentara Mesir dan Militan** (online), <http://www.news.detik.com> (9 Februari 2015)

Kenyataan bahwa hingga saat ini masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan oleh angkatan bersenjata atau tentara militer, maka perlu adanya pembekalan pemahaman ketentuan Hukum Humaniter Internasional bagi setiap prajurit TNI sebagai upaya agar para prajurit TNI dapat melaksanakan operasi militer perang sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta kebiasaan-kebiasaan hukum perang guna menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum perang yang dapat merugikan umat manusia. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha (Yonif Linud 501/Bajra Yudha) dilaksanakan dengan metode persuasif, edukatif, komunikatif, serta akomodatif.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana teknik pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/ Bajra Yudha?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/ Bajra Yudha?

## **C. PEMBAHASAN**

Keberadaan kekuatan pertahanan militer dalam suatu Negara merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata. Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Yonif Linud 501 Bajra Yudha. Lokasi Yonif Linud 501 Bajra Yudha dalam penelitian ini berada di Kota Madiun, yakni bertempat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun. Yonif Linud 501 Bajra Yudha merupakan satuan tempur dibawah Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula, Divisi II Kostrad. Sejarah pembentukan Yonif Linud 501 Bajra Yudha dimulai sejak tanggal 22 Januari tahun 1961 dengan dibentuknya Batalyon Infanteri 530/Raiders. Pada tanggal 30 Januari 1961, Yonif 530/Raiders diubah menjadi Batalyon Yonif 530/Para. Hingga kemudian, pada tanggal 3 Maret 1973 berdasarkan Surat Keputusan Pangkostrad Nomor Skep/015/III/1973 tertanggal 3 Maret 1973 Yonif 530/Para diubah menjadi Yonif Linud 501/Bajra Yudha Brigif Linud 18/Trisula.

## **1. Teknik Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501/ Bajra Yudha**

Sosialisasi Hukum diwujudkan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap hukum, disiplin, dan tata tertib.<sup>8</sup> Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan sesuai Permenhan RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyuluhan Hukum. Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD di lingkungan Kesatuan Yonif Linud 501 Bajra Yudha yang dilaksanakan sesuai jadwal pada rencana garis besar latihan materi pokok dasar-dasar keprajuritan yakni pada minggu pertama Triwulan Pertama setiap tahun.

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip :

### **a. Singkat, Jelas, dan Padat**

Penyampaian suatu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu, dan menggunakan kalimat efektif, logis, serta mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca. Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan pada minggu pertama triwulan pertama setiap tahun yang tertuang di dalam jadwal rencana garis besar latihan tentang materi pokok dasar-dasar keprajuritan. Penyampaian materi sosialisasi Hukum Humaniter Internasional disampaikan menggunakan kalimat efektif, logis, serta mudah dipahami oleh setiap prajurit.

### **b. Komunikatif**

Yakni diantara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam proses tukar menukar informasi, pendapat, dan sikap menjalin pendekatan, dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyuluhan Hukum.



Internasional dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Hubungan timbal balik antara penyuluh hukum serta prajurit peserta sosialisasi yang komunikatif timbul dalam sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional secara langsung. Pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional secara langsung dilaksanakan dalam bentuk ceramah serta diskusi.

c. Edukatif

Cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam proses pendidikan. Penyampaian pesan dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan prajurit TNI AD (Pendidikan Pembentukan). Pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan sejak prajurit menempuh pendidikan kemiliteran, hingga prajurit ditugaskan di Yonif Linud 501 Bajra Yudha.

d. Informatif

Materi yang disampaikan penyuluh sebagai sumber informasi hukum menggunakan bahasa yang baik, benar, serta jelas dan mudah dimengerti. Penyuluhan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilakukan oleh Pembinaan Hukum Kostrad, Pembinaan Hukum Kodam, serta Pembinaan Hukum Divisi Kostrad.

e. Keterpaduan

Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan dengan metode dan materi yang mendasarkan pada suatu sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

f. Kesenambungan

Pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut. Pembekalan materi Hukum Humaniter Internasional melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun pada Triwulan pertama, selain itu informasi terkait dengan Hukum Humaniter Internasional juga disampaikan melalui *apel* pagi maupun *jam komandan*.

g. Aplikatif

Hukum Humaniter Internasional merupakan materi hukum yang bersifat terapan untuk mendukung pelaksanaan tugas prajurit khususnya dalam pelaksanaan operasi militer perang. Hukum Humaniter Internasional menjadi dasar prajurit mengenai tata cara melaksanakan pertempuran pada konflik bersenjata internasional.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha adalah :

a. Persuasif

Pembicara atau penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan prajurit peserta penyuluhan hukum sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian, serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara berkaitan dengan materi sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan persuasif dalam sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha dilakukan melalui penyediaan perangkat lunak berupa materi hukum yang dikemas dalam suatu presentasi yang menarik perhatian serta minat prajurit dalam memahami ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

b. Edukatif

Pembicara bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing prajurit peserta penyuluhan Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan edukatif dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional juga dilaksanakan dengan pemberian buku pedoman Tata Cara

Melaksanakan Pertempuran Sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, serta pemberian buku pedoman Bertempur Secara Benar Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa Bersenjata untuk Angkatan Bersenjata kepada setiap prajurit yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap prajurit dalam melaksanakan pertempuran di dalam konflik bersenjata internasional.

c. Komunikatif

Pembicara berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang menimbulkan suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dengan metode pendekatan komunikatif dilaksanakan melalui ceramah dalam suatu forum yang diberikan oleh penyuluh hukum yang kemudian tercipta suatu pembicaraan yang akrab, terbuka, dan timbal balik dimana setiap prajurit peserta penyuluhan hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait materi penyuluhan Hukum Humaniter Internasional.

d. Akomodatif

Dalam memberikan penyuluhan Hukum Humaniter Internasional pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan akomodatif dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan melalui pembentukan *Forum Group Discussion* atau kelompok diskusi, dimana prajurit TNI AD Batalyon Infanteri dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi satu sama lain guna memperdalam pengetahuan mengenai Hukum Humaniter Internasional.

## **2. Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dilakukan, dan sistem hukum ini menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Ada tiga komponen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>9</sup>

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penalarannya terletak pada hukum yang hidup, bukannya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Selanjutnya komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum ; kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.<sup>10</sup>

Keberlakuan dan kepatuhan (disiplin) prajurit terhadap Hukum Humaniter Internasional ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adanya kebijakan strategis yang memberlakukan Hukum Humaniter Internasional sebagai disiplin internal TNI / TNI AD, pembentuk sikap dan tingkah laku budaya hukum pada prajurit perseorangan maupun dalam hubungan Satuan melalui proses pendidikan dan latihan, serta tersedianya perangkat lunak dalam bentuk doktrin yang menempatkan Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam Operasi Militer. Tingginya kualitas profesionalisme prajurit bukan ditentukan oleh tingginya

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, A History of American Law, **Hukum Amerika Sebuah Pengantar**, Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta. 2001. Hlm 190.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 6.

daya perusak, daya penghancurnya, tetapi ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum dan penerapannya dalam taktik dan doktrin pencapaian tugas pokok dalam pertempuran.<sup>11</sup>

Sebagaimana teori Lawrence M. Friedman, pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha dapat dikatakan efektif apabila aturan-aturan, kaidah-kaidah, serta norma-norma yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional telah terwujud dalam tiga komponen sistem hukum Yonif Linud 501/Bajra Yudha yakni dalam substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum Yonif Linud 501/Bajra Yudha yakni sebagai berikut :

a. Substansi Hukum

Ratifikasi Konvensi Jenewa I, II, III, IV Tahun 1949 yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari kehancuran dan penderitaan yang tidak perlu guna menjamin kelanjutan dan harkat hidup manusia pada waktu perang oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Pada Tanggal 12 Agustus 1949 wajib dihormati, dipedomani, dan diterapkan oleh prajurit TNI AD dalam setiap pertempuran.

Efektifitas sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional sesuai Konvensi Jenewa I, II, III, IV Tahun 1949 di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha diwujudkan melalui pemberian buku Pedoman Tata Cara Melaksanakan Pertempuran Sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan buku Bertempur Secara Benar kepada setiap prajurit. Buku pedoman tersebut berisi ketentuan-ketentuan pokok Hukum Humaniter Internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Tahun 1949 yang digunakan sebagai bekal pokok dan pegangan prajurit dalam mengantisipasi keadaan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Pemberian buku pedoman tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan bertempur secara

---

<sup>11</sup> Bertempur Secara Benar Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa Bersenjata untuk Angkatan Bersenjata, Direktorat Hukum TNI AD, Hlm 5.

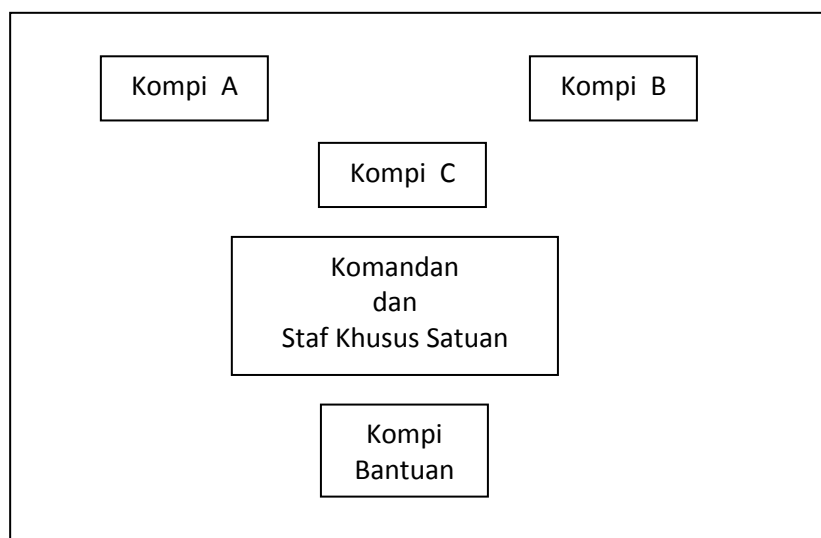
benar kepada setiap prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dan bekal awal prajurit dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional di setiap pelaksanaan tugas-tugas operasi militer serta memberi penegasan pokok-pokok ketentuan Hukum Humaniter Internasional termasuk yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh prajurit dalam rangka perlindungan dan pencegahan terhadap korban-korban perang.

b. Struktur Hukum

Efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit Yonif Linud 501 Bajra Yudha juga diwujudkan dalam penggunaan teknik dan strategi pertempuran serta penyusunan pola pertahanan tempur di dalam konflik bersenjata internasional sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Struktur organisasi Yonif Linud 501 Bajra Yudha terdiri Komandan, Wakil Komandan, 1 (satu) Kompi Markas, 3 (tiga) Kompi Senapan (Kompi A, Kompi B, Kompi C, dan 1 (satu) Kompi Bantuan serta 4 (empat) staf yang terdiri dari Staf I Intelijen, Staf II Operasional, Staf III Personalia, dan Staf IV Logistik.

Susunan pola pertahanan Yonif Linud 501 Bajra Yudha dalam pelaksanaan operasi militer perang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai berikut :

**Bagan 4.2.**  
**Susunan Pola Pertahanan Yonif Linud 501 Bajra Yudha dalam Pelaksanaan Operasi Militer Perang Sesuai Hukum Humaniter Internasional**



Komandan Batalyon dengan pertimbangan staf khusus satuan yang terdiri dari staf Batalyon, Dokter dan Perwira Hukum (Pakum) bertugas untuk :

- a. Memelihara disiplin yang ketat namun wajar.
- b. Memberikan perintah secara jelas dan berdasarkan hukum.
- c. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang sulit.
- d. Menjamin perintahnya dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan hukum.
- e. Melaporkan para pelanggar kepada perwira atasan yang mempunyai kewenangan untuk menindak.
- f. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata musuh atau sekutu kepada penguasa militer yang lebih tinggi.

Atas perintah Komandan, Kompi Senapan A dan Kompi Senapan B secara langsung berhadapan dengan musuh dalam pertempuran. Sedangkan Kompi Senapan C bertugas memberi bantuan kepada Kompi Senapan A maupun Kompi senapan B yang memerlukan bantuan. Kompi Bantuan dan Kompi Markas yang terdiri dari 1 (satu) peleton kesehatan, 1 (satu) peleton komunikasi, 1 (satu) peleton pioneer dan amunisi, serta 1 (satu) peleton angkutan bertugas untuk mendukung tugas Operasi Militer Perang.

#### c. Budaya Hukum

Efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha juga diwujudkan melalui terbentuknya suatu budaya hukum yang menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional. Doktrinal serta budaya militer yang keras membentuk jiwa prajurit sebagai alat pertahanan Negara yang pantang menyerah dalam setiap pelaksanaan tugas bela Negara melalui Operasi Militer.

Profesionalisme serta jati diri prajurit TNI AD tidak ditentukan melalui daya perusak, daya penghancur, serta kebringasannya, melainkan ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum dan

penerapannya dalam taktik atau doktrin pencapaian tugas pokok dalam pertempuran. Terbentuknya suatu budaya hukum terkait dengan kepatuhan para prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional ditunjukkan melalui dipatuhinya ketentuan-ketentuan serta pertimbangan-pertimbangan Hukum Humaniter Internasional dalam setiap pelaksanaan pertempuran.

Adanya batasan-batasan yang diatur dalam pelaksanaan pertempuran sesuai Hukum Humaniter Internasional dapat meredam doktrinal serta budaya militer yang keras, memiliki daya perusak dan daya penghancur, menjadi prajurit yang memiliki kualitas profesionalisme serta patuh terhadap hukum dan penerapannya dalam pertempuran.

#### **D. PENUTUP**

Sosialisasi hukum di lingkungan TNI AD diwujudkan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap hukum, disiplin, dan tata tertib. Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyuluhan Hukum.

Sosialisasi ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha pada setiap minggu pertama triwulan pertama setiap tahun, serta informasi terkait perkembangan Hukum Humaniter Internasional disampaikan pada *apel* pagi dan pada *jam komandan*. Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- (a) Singkat, Jelas, dan Padat,
- (b) Komunikatif,
- (c) Edukatif,
- (d) Informatif,
- (e) Keterpaduan
- (f) Kesenambungan, dan
- (g) Aplikatif.



Sedangkan metode pendekatan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang digunakan adalah :

- (a) Metode Persuasif,
- (b) Metode Edukatif,
- (c) Metode Komunikatif,
- (d) Metode Akomodatif.